



LKPJ 2013

KKU Masih WDP

Borneo Tribune, Sukadana Bupati Kayong Utara H. Hildi Hamid di hadapan anggota DPRD Kayong Utara menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013.

Dalam laporan, bupati dua periode ini menyampaikan, untuk menciptakan nuansa pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan akuntabel, rasional dan demokratis, maka pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dijelaskannya Hildi Hamid, jika dicermati kondisi perubahan pedoman dalam aturan tersebut terdapat perubahan yang mendasar dalam sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara umum sifatnya dan secara khusus

yaitu terhadap penyusunan laporan keuangan antara lain menyangkut basis akuntansi yang diberlakukan dalam penyusunan keuangan. Selama ini penyusunan masing menggunakan basis modifikasi kas, dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk pengakuan aset, kewajiban dan akuitas dalam neraca menggunakan basis akurat.

"Saya informasikan terutama terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2013 telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama 60 hari," kata Hildi Hamid.

Dari hasil audit yang diterima pada 15 Juli 2014 di kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Kayong Utara

ra mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). "Mudah-mudahan dengan tekat dan semangat yang tinggi pada tahun 2014, laporan keuangan pemerintah kabupaten Kayong Utara lebih berkualitas dengan predikat WTP," harapnya.

Untuk mencapai predikat WTP tersebut, bupati berharap seluruh jajaran pemerintah kabupaten Kayong Utara ikut merasakan atau mendukung dan menyatukan pendapat pada hal yang sama.

Dalam penjelasannya, Bupati Kayong Utara ini menyampaikan pos laporan realisasi anggaran dimana pendapatan tahun 2013 sebesar Rp.477,22 miliar atau tercapai 99,56 persen dari Anggaran pendapatan tahun 2013 sebesar Rp.479,35 miliar.

Terkait belanja realisasi sebesar Rp.506,11 miliar atau tercapai 95,39 persen

dari anggaran belanja sebesar Rp.530,34 miliar. Dengan kondisi demikian, pada tahun anggaran 2013 laporan realisasi anggaran mengalami defisit sebesar Rp.28,89 miliar, dimana selisih pendapatan sebesar Rp.447,22 miliar dan belanja Rp.506,11 miliar.

Selain itu, Bupati Kayong Utara juga menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penghitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan 2014 dan KUA PPAS 2015.

Dalam nota pengantar KUA PPAS perubahan 2014, disampaikan KUA tahun anggaran 2014 murni sebesar Rp.523.715.393.325,96 menjadi Rp.527.775.346.681,15 atau meningkat sebesar Rp.4.059.963.355,19 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Demikian juga pada belanjanya, dimana juga terdapat peningkatan belanja dari Rp.543.045.063.040,40 menjadi Rp.547.640.955.288,59 pada APBD perubahan atau selisih sebesar Rp.4.059.953.355,19 yang bersumber dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Demikian pula untuk KUA PPAS APBD 2015, disampaikan proyeksi APBD Kayong Utara terdapat lebih menurun dari tahun 2014 dimana tercatat pendapatan sebesar Rp.515.133.006.309,15 dengan pendapatan asli daerah

hanya tercatat Rp.18.593.687.623,15 dan dana perimbangan sebesar Rp.466.833.224.649,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.29.706.094.037,00. dengan belanja baik langsung maupun tidak langsung berjumlah Rp.529.006.953.169,15 atau defisit sebesar Rp.13.873.946.860. (DL)